



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WADI DASMI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 7861

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	599.000.000
1. Tanah Seluas 340 m2 di PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/135 m2 di AGAM, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 584 m2/54 m2 di PASAMAN, WARISAN Rp. 22.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 206 m2/206 m2 di AGAM, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/48 m2 di AGAM, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	291.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000		
3. MOBIL, HONDA HR-V PRESTIGE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	131.570.200
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	370.688.524
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.392.258.724



III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.392.258.724

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.